

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Undang-undang pasar modal No.8 tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan bahwa bursa efek sebagai pihak yang menyediakan dan menyelenggarakan sistem dan atau saran untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. di Indonesia sendiri bursa efek yang terkenal pada masyarakat adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berperan sebagai penyedia wadah terjadinya jual beli efek atau surat berharga di Indonesia. Perusahaan terbuka atau perusahaan yang *go public* melakukan penjualan terhadap saham yang diterbitkannya melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut BEI terdapat 9 sektor industri, yaitu : 1)Sektor industri dasar dan kimia; 2)Sektor aneka industri; 3)Sektor industri barang konsumsi; 4)Sektor property; 5)Sektor insfaktur, utilitas, dan transportasi; 6)Sektor keuangan; 7)Sektor pertanian; 8)Sektor pertambangan; 9)Sektor perdagangan dan investasi (Saham OK , 2017).

Dasar pemilihan objek penelitian ini adalah sektor industri barang konsumsi. Karena pertumbuhan industri barang konsumsi merupakan industri yang perkembangannya paling terbanyak atau terbesar di Indonesia.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Industri Barang Konsumsi

*Sumber:* Badan Pusat Statistik (BPS)

Dengan kontribusi terbesar, industri barang konsumsi menjadi salah satu faktor kuat untuk mengukur ekonomi secara keseluruhan. Melalui grafik pertumbuhan Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa faktor penyebab melambatnya pertumbuhan industri barang konsumsi adalah masyarakat yang menahan konsumsinya pada awal tahun sehingga di kuartal I 2019 pertumbuhan industri konsumsi hanya sebesar 5,01% sedikit lebih melambat dibanding kuartal IV tahun 2018 5,08%. Dampak lain dirasakan oleh perusahaan yang bergerak di sektor konsumen walaupun kinerja emiten sektor konsumen tetap tumbuh. Tetapi, kinerja beberapa perusahaan besar khususnya di industri makanan dan minuman justru mengalami penurunan penjualan pada kuartal 1 2019. Berikut grafik pertumbuhan penjualan industri makanan dan minuman:



Gambar 1.2 Pertumbuhan Penjualan Sektor Makanan dan Minuman

*Sumber:* Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari gambar 1.2, dapat dilihat bahwa sektor makanan dan minuman pada kuartal IV 2017 menyentuh level tertinggi sebesar 13,77%. Namun, sejak saat itu pertumbuhan penjualan sektor ini mengalami penurunan hingga kuartal I 2019 yang hanya tumbuh sebesar 6,77% (yoy). Meskipun meningkat dibanding sebelumnya pertumbuhan pada tahun 2019 merupakan pertumbuhan terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka 8-12%. Pelemahan ini sudah terlihat sejak pertengahan tahun 2018.

Berdasarkan perlemahan pertumbuhan penjualan tersebut membuat perusahaan makanan dan minuman harus lebih berhati-hati dalam melakukan

penyusunan laporan keuangan atau dalam akuntansi dikenal sebagai prinsip kehati-hatian serta disebut konservatisme akuntansi. Hal ini disebabkan dalam pengukuran konservatisme akuntansi terdapat akun penjualan yang menjadi indikator untuk melihat perusahaan tersebut menerapkan konservatisme atau tidak. Di Indonesia sendiri perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman ada sebanyak 54 perusahaan, tetapi didalam bursa efek Indonesia tahun 2019 hanya terdapat 26 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada sub sektor makanan dan minuman yang ditampilkan pada lampiran ([www.edusaham.com](http://www.edusaham.com)).

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 2017 mengemukakan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang memiliki tujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan”.

Laporan keuangan yang baik dapat dilihat dari kualitasnya, dalam melakukan penilaian terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat melalui indikator kualitas laporan keuangan itu sendiri yaitu diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Beberapa pengguna laporan keuangan telah dipaparkan oleh PSAK No. 1 2017 yang diantaranya adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman (kreditor), pemerintah, *supplier*, pelanggan dan masyarakat. Savitri (2016) menjelaskan penyajian informasi yang digunakan publik menuntut suatu pengungkapan yang menyeluruh dan benar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun demikian akuntan sepakat mengenai pedoman kualitas yang harus ada di dalam informasi akuntansi sebagaimana terdapat dalam kerangka konseptual akuntansi. Akuntansi menerjemahkan pelaporan keuangan kedalam kualitas yang fundamental dan harus memenuhi karakteristik. selain itu, terdapat pula kualitas tambahan dari informasi

akuntansi yang harus dipenuhi yaitu dapat dibandingkan, diverifikasi, tepat waktu dan dapat dipahami. Berkaitan dengan pengungkapan *true value* ini terdapat penerapan konsep yang disebut konservatisme akuntansi.

Menurut Savitri (2016) Konservatisme merupakan reaksi yang berhati-hati atas ketidakpastian yang ada agar ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dari kenetralannya dapat diperbaiki. Pelaporan keuangan yang didasari oleh kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan. Definisi resmi dari konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep Nomor 2 FASB (*Financial Accounting Standard Board*) yang mengartikannya sebagai berikut: “konservatisme merupakan reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan”. Prinsip konservatisme akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya, akibatnya laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*).

Menurut Rohminatin (2016) konservatisme akuntansi bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer yang berkaitan dengan kontrak pengguna laporan keuangan sebagai media. Konsekuensinya apabila terdapat kondisi yang kemungkinan menimbulkan kerugian biaya dan utang maka kerugian biaya atau utang tersebut harus segera diakui. Sebaliknya, apabila terdapat kondisi yang memungkinkan menghasilkan laba, pendapatan atau aktiva maka laba pendapatan dan aktiva tersebut tidak boleh langsung diakui sampai kondisi tersebut benar terjadi sejalan dengan pernyataan Savitri (2016:34) bahwa konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba serta memanfaatkan informasi yang asimetri ketika menghadapi klaim atas suatu aktiva dari perusahaan tersebut. Sebagai seorang akuntan harus menyeimbangkan risiko

sebanyak mungkin dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi risiko tersebut. Beberapa alasan konservatisme masih bertahan (Savitri, 2016) yaitu:

- a. Kecenderungan bersikap pesimis dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang berlebihan.
- b. Laba dan penilaian yang tinggi dinilai berbahaya karena dianggap melaporkan hal yang tidak benar menjadi besar.
- c. Akuntan lebih mampu memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan mengkomunikasikan informasi tersebut.

Berdasarkan alasan bertahan konservatisme menurut Savitri (2016) dalam penerapannya konservatisme berpedoman pada PSAK dan IFRS. Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang telah mengadopsi Internasional Financial Reporting Standart (IFRS) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 menyebutkan ada beberapa metode yang menerapkan prinsip konservatisme:

1. PSAK No. 14 mengenai persediaan yang terkait dengan pemilihan perhitungan biaya persediaan.
2. PSAK No. 16 mengenai aset tetap dan penyusutan.
3. PSAK No. 17 mengenai akuntansi penyusutan
4. PSAK No. 19 mengenai aset tidak berwujud yang berkaitan dengan amortisasi.
5. PSAK No. 20 mengenai biaya riset dan pengembangan

Selanjutnya penerapan konservatisme tidak menjadi prinsip yang diatur oleh IFRS. Hal ini dikarenakan IFRS lebih menekankan kerelevanan dari informasi akuntansi dan lebih menerapkan pada prinsip *fair value*. Berikut beberapa aturan mengenai semakin berkurangnya penggunaan akuntansi konservatisme dalam IFRS, yaitu:

1. IAS 11 (*zero profit recognition for fixed price contracts*) mengenai penggunaan metode POC (*percentage to completion*) sebagai pengganti dari metode CC (*completed contract*) untuk pengakuan pendapatan dan biaya.

2. IAS 12 (*Deferred tax Asset*) mengenai pengakuan *deferred tax asset* pada neraca jika mungkin (*probable*) terdapat *future taxable profit*.
3. IAS 16 (*Property; Plant and Equipment*) mengenai pengukuran nilai aktiva
4. IAS 38 (*Capitalisation to Development Cost*) mengenai biaya pengembangan.

Dari adanya tingkat ketidakpastian dalam situasi perusahaan maka secara penuh prinsip konservatisme ini tidak bisa dihapuskan. Selain itu, standar IFRS juga menekankan penyajian informasi akuntansi ke arah prediksi termasuk dalam melakukan pengukurannya.

Konservatisme akuntansi dapat diukur dengan menggunakan 3 indikator yaitu *earning /stock return measure*, *earning/accrual measure* dan *net asset measure* (Savitri, 2016:45). Dalam penelitian ini, proxy yang digunakan adalah *earning/accrual measure*, *earning/accrual measure* yang berfokus pada model Zhang (2007) yang diproksikan dengan CONACC (*conv\_accrual*) yang didapatkan dengan memfokuskan pada laporan laba rugi selama beberapa tahun dan menghasilkan akrual negatif/Akrual yang dimaksud disini adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Penggunaan perkalian arus kas operasi terhadap -1 (minus satu) dimaksudkan untuk mempermudah suatu analisa. Berdasarkan hasilnya berupa akrual negatif tersebut, dapat dinyatakan bahwa semakin besar akrual negatif maka semakin besar konservatif akuntansi yang diterapkan (Savitri, 2016 33-34)

Pada tahun 2017 terdapat sebuah kasus yang terkait dengan konservatisme akuntansi di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa faktor dimana salah satunya adalah masih rendahnya penerapan prinsip konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan. Seperti yang telah terjadi pada kasus perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera (AISA). dimana ditahun 2017 AISA melakukan pengelembungan dana dalam laporan keuangannya pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap AISA. Laporan investigasi berbasis fakta yang telah dikeluarkan juga menemukan *overstatement* sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA entitas makanan AISA. (<https://investasi.kontan.co.id/>).

Penelitian terkait konservatisme akuntansi telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, mengingat memang kontroversialnya penerapan prinsip konservatisme ini dengan berbagai kendala dan manfaat di dalam pelaksanaannya. Penelitian yang dilakukan pastinya juga menggunakan beberapa variabel dan objek penelitian yang berbeda. Adapun variabel-variabel yang diduga akan mempengaruhi konservatisme akuntansi berdasarkan penelitian terdahulu adalah Kesulitan Keuangan oleh Putri (2017) dengan hasil tidak berpengaruhnya kesulitan keuangan pada konservatisme akuntansi dan Dewi dan Suryanawa (2014) dengan menunjukkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh ke arah negatif terhadap konservatisme akuntansi, Struktur Kepemilikan Manajerial oleh Hapsari (2018) memberikan hasil bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap konservatisme, Risiko Litigasi oleh Nursani, Fadhilah, dan Sofianty (2019) mengatakan bahwa risiko litigasi tidak berpengaruh pada konservatisme akuntansi serta Zuhriyah (2017) menetapkan bahwa risiko litigasi berpengaruh positif, *Good Corporate Governance* oleh Arifyati dan Machmuddah (2014) berpengaruh signifikan terhadap konservatisme, *Debt Covenant* oleh Nursani, Fadhilah, dan Sofianty (2019) berpengaruh negatif, dan *Political Cost* oleh Nasir, Ilham, dan Yusniati (2014) tidak berpengaruh terhadap konservatisme sedangkan Iskandar (2019) menyatakan berpengaruh kearah positif. Berdasarkan hasil-hasil penelitian diatas ditemukan hasil yang tidak konsisten pada variabel sebagai berikut Kesulitan Keuangan, Risiko Litigasi, dan *Political Cost*.

Kesulitan keuangan (*Financial Distress*) adalah “tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditasi” (Fahmi, 2017:93). *Financial distress* merupakan sebuah keadaan awal dimana perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya yakni kewajiban likuiditas, dan juga kewajiban solvabilitas. Hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan objek penelitian yaitu PT. Prashida Aneka Niaga, Tbk yang mana mengalami kerugian dari tahun 2014-2016 akan tetapi tidak dikategorikan bangkrut secara hukum. Menurut

Brigham dan Gapenski (1996) dalam Nurcahyanti (2015:8) terdapat lima tipe kebangkrutan yaitu sebagai berikut:

- a. Kegagalan ekonomi (*Economic Failure*) Dalam menjalankan usaha tidak menutup kemungkinan bila biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan melebihi dari pendapatan yang diperoleh perusahaan. Kondisi tersebut yang dapat diartikan sebagai kegagalan ekonomi.
- b. Kegagalan keuangan (*Financial Distressed*) Perusahaan dikatakan mengalami kegagalan keuangan berarti perusahaan mengalami kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja.
- c. Insolvensi teknis (*Technical Insolvency*) Insolvensi teknis lebih mengarah pada kegagalan perusahaan dalam menjalani teknis/ketentuan kewajiban yang berlaku. Perusahaan dianggap gagal jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, walaupun total aset melebihi total utang.
- d. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan (*Insolvency in Bankruptcy*) Kebangkrutan juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih rendah dari liabilitas yang dimiliki.
- e. *Legal Bankruptcy* Perusahaan dinyatakan bangkrut secara hukum, hanya jika diajukan secara resmi dengan Undang-Undang.

Menurut Savitri (2016) terdapat 3 prediktor yang digunakan untuk mengukur *financial distress* yakni *Altman* model, *Zmijewski* model dan *Springate* model. Dalam penelitian ini, melalui hasil penelitian pertama yang dilakukan Hadi dan Anggreani (2008) menunjukkan bahwa model prediksi Altman merupakan prediktor yang terbaik dan menunjukan metode yang paling populer untuk melakukan prediksi *financial distress*. Selain itu, menurut Haron (2009) Altman mampu memprediksi kesulitan keuangan dengan tingkat akurasi 95% melalui analisis diskriminan yang digunakannya. Altman Z-Score memiliki dua rasio yaitu rasio 4 dan rasio 5 yang dimana keduanya digunakan pada perusahaan berbeda, untuk Z-score rasio 5 digunakan pada perusahaan manufaktur sedangkan rasio 4 digunakan pada perusahaan non-manufaktur. Berdasarkan hal tersebut, maka



hubungan antara kesulitan keuangan dan konservatisme akuntansi terlihat pada hasil Z Score dimana semakin besar indikator nilainya maka semakin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki konservatisme yang besar.

Faktor lain yang mempengaruhi konservatisme akuntansi adalah risiko litigasi. Ningsih (2013) mengemukakan risiko litigasi adalah risiko yang akan terjadi apabila tidak sesuai dengan praktik akuntansi dengan ketentuan hukum yang mengakibatkan biaya yang tidak sedikit. Manajer akan melakukan peningkatan penyajian laporan keuangan untuk menghindari kerugian akibat litigasi tersebut. Risiko litigasi dapat muncul ketika sebuah perusahaan melakukan kegiatan akuntansi tanpa memperhatikan atau mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Ningsih, kasus yang dihadapi oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera memiliki relasi dengan risiko litigasi dimana PT. Tiga Pilar Sejahtera telah melakukan ketidaksesuaian praktik akuntansi pada akun piutang, persediaan, dan aset tetap yang dananya dilembungkan.

Melalui penelitian terdahulu menemukan bahwa risiko litigasi tinggi akan memperlemah konservatisme akuntansi. Temuan tersebut didukung oleh Zuhriyah (2017). Hasil lain yang berbeda dari temuan tersebut disajikan oleh Putri (2017) dan Agustina et al.(2015) bahwa hukum di Indonesia tidak mengancam kelangsungan hidup dari perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak memperhitungkan risiko litigasi ini terhadap pengaruhnya kepada konservatisme akuntansi. Untuk mengukur risiko litigasi dapat menggunakan rasio *Debt To Equity Ratio* (DER), dengan melihat rasio DER yang semakin tinggi maka risiko litigasi yang dihadapi perusahaan juga akan semakin besar, karena hutang yang dimiliki jauh lebih besar dari ekuitas yang dimiliki perusahaan, yang akan digunakan untuk menutupi hutang yang dimiliki perusahaan.

Hubungan lain ditunjukkan oleh faktor *political cost*, *Political cost* terjadi ketika sebuah perusahaan dengan pemerintah yang memiliki wewenang berseteru dalam melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya pada kasus dimana perusahaan besar melakukan

penundaan laporan laba untuk menghindari pajak atau layanan publik yang akan dibayar ke pemerintah. Sedangkan penelitian terdahulu terkait *Political cost* dilakukan oleh Nursani (2019) menghasilkan pengaruh negative *political cost* terhadap konservatisme. Sedangkan perbedaan ditunjukkan pada penelitian Dewata *et al* (2018) yang menunjukkan tidak berpengaruhnya *political cost* kepada konservatisme akuntansi. Melalui kedua penelitian tersebut penelitian kali ini menggunakan pengukuran *SIZE TA* (ukuran perusahaan melalui total aset) untuk mengukur biaya politis. Pengukuran menggunakan total aset dikarenakan total aset lebih konsisten atau stabil dalam menggambarkan suatu nilai di sebuah perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2019) Perusahaan besar cenderung sensitif dan lebih sering melakukan penerapan prinsip konservatisme untuk menghindari atau meminimalkan besarnya biaya politik yang diminta oleh pemerintah. Oleh karena itu, jika perusahaan besar mempunyai laba yang tinggi secara relatif maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan. Akhirnya, manajer perusahaan besar mungkin cenderung memilih metode akuntansi yang menunda pelaporan laba atau dalam artian meninggalkan prinsip konservatisme akuntansi untuk mengurangi tanggungan *political cost* oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas dan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesulitan Keuangan, Risiko Litigasi, *Political Cost* Terhadap Konservatisme Akuntansi. (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.”**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Penerapan konservatisme akuntansi yang terjadi pada saat ini belum terlaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan besar yang ingin mendapatkan investor dan kreditor sehingga manajer melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba. Disebabkan oleh itu kecurangan dalam pelaporan keuangan sangat rentan terjadi. Selain itu, melalui perbedaan hasil penelitian

terhadap variabel-variabel yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah beberapa variabel yang diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan hasil inkonsisten terhadap konservatisme akuntansi, diantaranya: kesulitan keuangan, risiko litigasi, dan *Political cost*. Berdasarkan perumusan masalah diatas dan didukung oleh latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesulitan keuangan, risiko litigasi, *political cost*, dan konservatisme akuntansi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
2. Apakah berpengaruh secara silmutan kesulitan keuangan, risiko litigasi, dan *political cost* terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
3. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
4. Apakah risiko litigasi berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
5. Apakah *political cost* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kesulitan keuangan, risiko litigasi, *political cost*, dan konservatisme akuntansi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara silmutan kesulitan keuangan, risiko litigasi, dan *political cost* terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

3. Untuk mengetahui pengaruh kesulitan keuangan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh *political cost* terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak mana pun, adapun kegunaan yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis merupakan pencapaian dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pihak akademik, Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
2. Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan referensi, serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kesulitan keuangan, risiko litigasi, dan *political cost*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Kegunaan praktis berhubungan dengan praktik suatu teori. Oleh karena itu manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan dapat memberikan

- gambaran mengenai pentingnya pengaruh kesulitan keuangan, risiko litigasi, dan *political cost* dalam konservatisme akuntansi pada perusahaan
2. Bagi Investor, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para investor dalam berinvestasi ke perusahaan makanan dan minuman dan memberikan informasi serta pemahaman kepada investor mengenai kesulitan keuangan, risiko litigasi, *political cost* yang ada pada perusahaan makanan dan minuman.
  3. Bagi Regulator, sebagai acuan atau gambaran pentingnya konservatisme akuntansi dalam penyajian laporan keuangan di Indonesia.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan tugas akhir yang merupakan penjelasan ringkas penelitian dimulai dari bab 1 sampai bab 5, ditafsirkan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan gambaran umum dari objek penelitian, periode penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Menjelaskan secara ringkas dan padat tentang landasan-landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga menguraikan beberapa hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan terkait penggunaan metode, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, dan memaparkan tentang teknik yang digunakan dalam penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang penjabaran pembahasan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan sehubungan dengan pengujian maupun teknik analisis data.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian atau jawaban dari pertanyaan penelitian terhadap variabel-variabel terkait, kemudian menguraikan manfaat penelitian dalam bentuk saran.